



**PUTUSAN**

Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat

kediaman di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 24 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Kabupaten Banggai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 44/11/III/2009 tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I umur 2 tahun (dalam asuhan Pemohon);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah di Kel. Sisipan, tetapi sejak bulan Desember 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berulang-ulang terjadi dan puncaknya pada bulan April tahun 2013, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan kondisi rumah tangganya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena tidak adanya kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 26 Juni 2012 dengan Hakim Mediator Ahmad Fahlevi, S.HI dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Juni 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 21 Juni 2013 dan dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 12 Juli 2013, yang dibacakan dipersidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian pula dengan Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 12 Juli 2013, yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ahmad Fahlevi, S.HI dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 21 Juni 2013, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2013 dan tanggal 18 Juli 2013 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 12 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian terbukti Pemohon tidak hadir di persidangan dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas, oleh majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon digugurkan hal ini telah sejalan dengan maksud pasal 146 dan pasal 148 RBg (*Reglement Buiteegewesten*).

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0169/Pdt.G/2013/PA.Lwk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 24 Mei 2013 gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Ramadan 1434** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.Hi, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, SH.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadir Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Nurmaidah, S.Hi, MH.**

Hakim Anggota

**Ibrahim Ahmad Harun S.Ag**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	800.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )